



KEBIJAKAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEGURUAN TINGGI

Eka Yulianti

Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,

Universitas Lampung

Abstrak

Penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di lingkungan perguruan tinggi memiliki manfaat dalam meningkatkan pengembangan produk lokal, daya saing industri lokal, dan mendorong inovasi dan teknologi. Namun, tantangan dalam penerapan kebijakan TKDN meliputi kurangnya ketersediaan sumber daya lokal yang memadai, kurangnya akses terhadap teknologi mutakhir, dan keterbatasan anggaran yang tersedia. Perguruan tinggi perlu membangun kerjasama dengan industri lokal, melaksanakan riset dan pengembangan untuk menghasilkan produk dan teknologi yang lebih baik, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mengatasi tantangan tersebut. Teori kebijakan publik dapat membantu merancang kebijakan dan strategi yang tepat untuk penerapan TKDN di lingkungan kampus. Pemerintah dapat memberikan dukungan dan insentif yang diperlukan untuk mendorong perguruan tinggi dan industri lokal dalam memenuhi persyaratan TKDN. Dengan persiapan dan implementasi yang baik, penerapan kebijakan TKDN di lingkungan perguruan tinggi dapat memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan bagi perkembangan industri lokal dan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Kata Kunci: pengadaan, tkdn, p3dn.

PENDAHULUAN

Pengadaan barang/jasa adalah pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/instansi lain yang prosesnya dimulai dari pasca

perencanaan sampai dengan selesainya seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. APBN/APBD membiayai kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut, baik secara mandiri maupun melalui pemasok barang/jasa. (Perpres 16:2018)

*Correspondence Address : echeaja@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i3.2023.1448-1455

© 2023UM-Tapsel Press

Dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa, baik negara maupun swasta (perusahaan) harus berpedoman pada nilai-nilai dasar atau prinsip dasar pengadaan barang dan jasa. Core value atau prinsip dasar menjadi pedoman atau dasar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus melakukan pembenahan di berbagai bidang, mulai dari bidang pendidikan, legislasi, politik, dan administrasi. Peningkatan ini hanyalah persyaratan untuk tetap up-to-date, yang menjadi semakin dinamis. Akhirnya, zaman yang semakin maju juga membentuk masyarakat yang kritis terhadap kebutuhannya untuk mendapatkan informasi dan layanan dari pemerintah secara cepat, tepat dan mudah. (Ndikron et al., 2020).

Pengembangan aturan Pengadaan Barang dan jasa untuk meningkatkan penggunaan dana pemerintah yang digunakan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, dalam proses pengadaan tujuannya adalah untuk terus menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas dan prinsip persaingan yang sehat. Barang/Jasa Pemerintah yang dibiayai oleh APBN/APBD. Upaya tersebut diperlukan untuk memperoleh barang/jasa yang terjangkau dan bermutu serta dapat dinilai baik secara fisik maupun finansial serta bermanfaat bagi kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat. (Siallagan et al., 2022).

Pemerintah berkomitmen mendorong optimalisasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk proyek-proyek strategis yang dibiayai negara dan di bidang manufaktur di Indonesia. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri nasional dalam rangka penutupan perdagangan global. Sejumlah regulasi terkait pelaksanaan simpanan korporasi antara lain

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Kelompok Nasional tentang Peningkatan Penggunaan Produksi dan Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2017 Perindustrian tentang Peraturan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Komponen Nasional (TKDN) Ponsel, Komputer Genggam, dan Tablet (kemenperin.go.id, 2023).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung upaya pemerintah untuk mendorong belanja produk dalam negeri (NDP), khususnya di bidang pendidikan untuk produk teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Hal ini sejalan dengan semangat belajar gratis, sehingga diharapkan belanja produk TIK akan mendorong digitalisasi sekolah sebagai bagian dari penciptaan sekolah dan infrastruktur sekolah belajar di masa depan. Dalam hal ini tentunya Universitas Lampung sebagai penyelenggara kegiatan pendidikan berupaya untuk mengangkat derajat sektor dalam negeri (TKDN) khususnya dalam pembelian barang dan jasa. Rumusan penelitian ini adalah bagaimana Pengimplementasian kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Universitas Lampung?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji kebijakan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perguruan Tinggi. Pendekatan ini melibatkan observasi, interaksi dengan subjek, dan pemahaman terhadap bahasa dan tafsiran mereka. Triangulasi dilakukan untuk menggali dan memproses data kualitatif, dengan metode observasi, literatur, dan survei. Pendekatan kualitatif diharapkan dapat memberikan gambaran deskriptif mengenai aktualitas, realitas sosial, dan persepsi

sasaran penelitian tanpa diintervensi oleh pengukuran formal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

James Anderson dalam Solichin Abdul (2015) menyatakan bahwa kebijakan publik itu ialah suatu “langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi” (Meutia, 2017).

James Anderson dalam Solichin Abdul (2015) menyatakan bahwa “kebijakan itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” (Meutia, 2017).

Banyak definisi tentang kebijakan publik dapat ditemukan di literatur ilmu kebijakan, yang kadang-kadang disebut sebagai studi kebijakan atau policy sciences, dan jumlahnya sudah mencapai ribuan. Namun, semakin banyaknya definisi tersebut menjadikan sulit untuk menemukan definisi yang memuaskan, dikarenakan sifatnya yang luas, kabur, dan tidak spesifik atau operasional.

Bridgeman dan Davis (2004:4-7) menerangkan bahwa kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan, sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum dan sebagai hipotesis (Meutia, 2017).

1. Kebijakan Publik Sebagai Tujuan. Kebijakan adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan utama dari kebijakan publik adalah pencapaian tujuan publik. Ini berarti bahwa kebijakan publik terdiri dari serangkaian tindakan pemerintah yang melibatkan intervensi dari kelompok-kelompok kepentingan, media, dan warga negara. Tujuannya

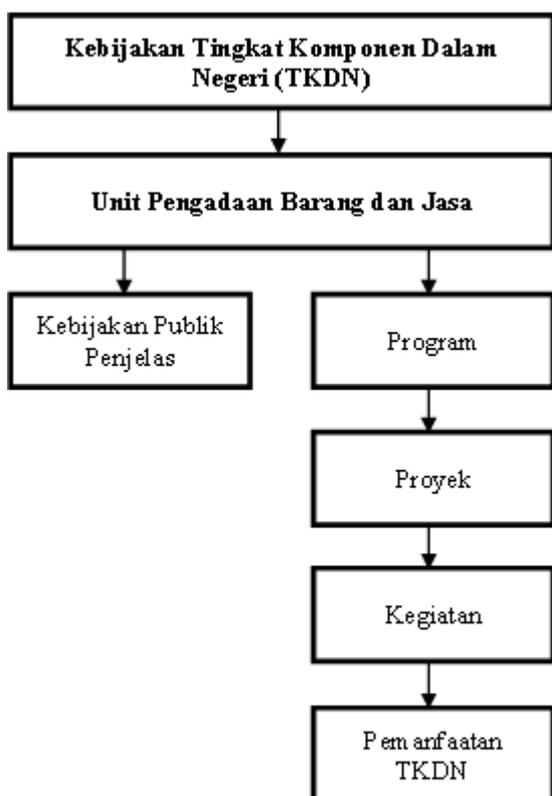
adalah untuk mencapai hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.

2. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal.

Kebijakan publik terdiri dari pilihan tindakan yang sah atau berwenang karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Namun demikian, implementasi keputusan yang sah tidak selalu dapat dilakukan sepenuhnya. Ada selalu celah atau kesenjangan antara rencana dan kenyataan, di antara apa yang direncanakan dan apa yang dapat dijalankan. Proses pembuatan kebijakan publik melibatkan dunia politik yang kompleks dan melahirkan tantangan yang sama terkait kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

3. Kebijakan publik sebagai hipotesis.

Kebijakan dibuat dengan dasar teori, model, atau hipotesis tentang akibat dan sebab dari suatu tindakan. Dalam membuat kebijakan, asumsi-asumsi tentang perilaku individu sering kali diambil sebagai dasar. Kebijakan selalu memberikan insentif untuk mendorong tindakan tertentu, tetapi juga dapat menyertakan disinsentif untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan. Kebijakan yang baik harus mampu memproyeksikan hasil yang diharapkan serta menyediakan mekanisme untuk mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi. Untuk memahami kebijakan sebagai hipotesis, diperlukan perhitungan ekonomi dan sosial dari para penasihat dan pembuat kebijakan. Karena banyaknya pemain dan kepentingan yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan.



Gambar 1. Skema Penerapan Kebijakan TKDN

Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri di dalam negeri. Dalam lingkungan perguruan tinggi, penerapan kebijakan TKDN dapat dilakukan dengan memprioritaskan penggunaan produk-produk dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di perguruan tinggi. Penerapan kebijakan TKDN di lingkungan perguruan tinggi dapat memberikan dampak positif dalam beberapa hal, di antaranya:

1. Mendorong penggunaan produk dalam negeri sehingga dapat meningkatkan kualitas produk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.
2. Meningkatkan keterlibatan perguruan tinggi dalam membangun ekonomi nasional melalui

pengembangan industri dalam negeri.

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk dalam negeri dan memperkuat identitas nasional.

Namun, penerapan kebijakan TKDN di lingkungan perguruan tinggi juga memiliki tantangan, di antaranya:

1. Terbatasnya ketersediaan produk dalam negeri yang memenuhi standar kualitas dan harga yang bersaing dengan produk impor.
2. Ketidakkampuan perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri dengan menggunakan produk dalam negeri.
3. Ketidakkampuan perguruan tinggi dalam menjamin ketersediaan produk dalam negeri yang memenuhi kebutuhan dan standar kualitas di masa depan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah dapat memberikan insentif dan dukungan kepada industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan produk dalam negeri yang dapat digunakan di lingkungan perguruan tinggi. Selain itu, perguruan tinggi dapat melakukan kolaborasi dengan industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan membangun jaringan yang saling menguntungkan.

Penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di lingkungan kampus memiliki urgensi yang penting karena memiliki dampak positif bagi pengembangan ekonomi nasional dan peningkatan kualitas produk dalam negeri. Berikut adalah beberapa urgensi penerapan TKDN di lingkungan kampus:

1. Meningkatkan Keterlibatan Perguruan Tinggi dalam Membangun Ekonomi Nasional

Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Dalam hal ini, penerapan TKDN di lingkungan kampus dapat meningkatkan keterlibatan perguruan tinggi dalam membangun ekonomi nasional dengan memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di perguruan tinggi.

2. Meningkatkan Kualitas Produk Dalam Negeri

Penerapan TKDN di lingkungan kampus dapat mendorong penggunaan produk dalam negeri sehingga dapat meningkatkan kualitas produk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Hal ini dapat menjadi stimulan bagi produsen dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk mereka sehingga dapat bersaing dengan produk impor.

3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Produk Dalam Negeri

Penerapan TKDN di lingkungan kampus dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk dalam negeri dan memperkuat identitas nasional. Hal ini dapat membantu memperkuat industri dalam negeri dan meningkatkan daya saing

produk dalam negeri di pasar domestik.

4. Mendorong Kolaborasi Antara Perguruan Tinggi dan Industri Dalam Negeri

Penerapan TKDN di lingkungan kampus dapat mendorong perguruan tinggi untuk melakukan kolaborasi dengan industri dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan membangun jaringan yang saling menguntungkan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas produk dalam negeri dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar domestik.

Dengan demikian, penerapan kebijakan TKDN di lingkungan kampus memiliki urgensi yang penting untuk mendukung pengembangan ekonomi nasional dan peningkatan kualitas produk dalam negeri. Untuk menerapkan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di lingkungan perguruan tinggi, beberapa hal yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman dan Kesadaran terhadap Kebijakan TKDN

Pemahaman dan kesadaran terhadap kebijakan TKDN sangat penting untuk mengimplementasikan kebijakan ini dengan tepat dan efektif. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus menyediakan waktu dan sumber daya yang cukup untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh anggota kampus, termasuk staf dan mahasiswa.

2. Identifikasi Produk dan Jasa yang Dapat Diproduksi atau Disediakan dalam Negeri

Perguruan tinggi perlu mengidentifikasi produk dan jasa yang dapat diproduksi atau disediakan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan kampus. Identifikasi ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi sumber daya dan potensi lokal yang dapat digunakan untuk memproduksi atau menyediakan produk dan jasa yang diperlukan.

3. Analisis Ketersediaan Produk dalam Negeri

Sebelum menerapkan kebijakan TKDN, perguruan tinggi perlu melakukan analisis ketersediaan produk dalam negeri yang sesuai dengan standar kualitas dan harga yang kompetitif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan kampus dan dapat bersaing dengan produk impor.

4. Pembentukan Tim Implementasi

Pembentukan tim implementasi sangat penting untuk mengimplementasikan kebijakan TKDN dengan efektif. Tim ini harus terdiri dari berbagai pihak di kampus, termasuk staf, dosen, dan mahasiswa. Tim ini harus bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan kebijakan TKDN di kampus.

5. Peningkatan Kolaborasi dengan Industri Dalam Negeri

Perguruan tinggi perlu meningkatkan kolaborasi dengan industri dalam negeri

untuk memastikan ketersediaan produk dan jasa yang memenuhi standar kualitas dan harga yang bersaing dengan produk impor. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama riset, pelatihan dan pendidikan, serta pengembangan jaringan yang saling menguntungkan.

6. Evaluasi dan Pemantauan

Evaluasi dan pemantauan sangat penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan TKDN di lingkungan perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus melakukan evaluasi secara berkala dan memantau pelaksanaan kebijakan TKDN untuk menilai dampaknya dan mengevaluasi kembali strategi yang digunakan jika diperlukan.

Dengan mempersiapkan hal-hal di atas, perguruan tinggi dapat lebih siap dalam menerapkan kebijakan TKDN di lingkungan kampus. Menerapkan kebijakan TKDN dapat mendorong pengembangan pendidikan dan pelatihan di perguruan tinggi. Hal ini akan meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja dalam negeri dan meningkatkan daya saing di pasar global. Dengan demikian, penerapan kebijakan TKDN di lingkungan perguruan tinggi dapat memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan bagi kampus dan masyarakat secara umum, serta mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Teori kebijakan publik James Anderson memandang kebijakan publik sebagai hasil dari interaksi kompleks antara berbagai aktor dan faktor yang saling terkait. Konsep interaksi ini

penting dalam menjelaskan bagaimana penerapan kebijakan TKDN dapat mempengaruhi berbagai aktor dan faktor terkait dalam lingkungan perguruan tinggi.

Penerapan kebijakan TKDN dapat dilihat sebagai suatu tindakan kebijakan, yang merupakan hasil dari interaksi antara berbagai aktor dan faktor yang saling terkait dalam lingkungan perguruan tinggi. Beberapa aktor dan faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan TKDN di lingkungan perguruan tinggi antara lain pihak kampus, pemerintah, industri lokal, serta masyarakat.

Menurut teori kebijakan publik James Anderson, implementasi kebijakan publik melibatkan tiga tahapan: formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Pada tahap formulasi kebijakan, pemerintah dan aktor lainnya mencari solusi untuk mengatasi masalah atau kebutuhan publik. Kemudian, pada tahap implementasi kebijakan, kebijakan tersebut dijalankan dengan melibatkan berbagai aktor dan faktor terkait. Selanjutnya, pada tahap evaluasi kebijakan, keberhasilan kebijakan dievaluasi dan dievaluasi ulang agar dapat ditingkatkan.

Dalam konteks penerapan kebijakan TKDN di lingkungan perguruan tinggi, teori kebijakan publik James Anderson dapat membantu menjelaskan interaksi kompleks antara berbagai aktor dan faktor terkait dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Interaksi ini dapat berpengaruh pada berbagai aspek, seperti kesadaran dan partisipasi masyarakat, peran pemerintah, kesiapan industri lokal, serta ketersediaan dan kualitas produk lokal.

Dalam implementasi kebijakan TKDN, pemerintah dapat berperan dalam memberikan regulasi yang mendukung, serta memberikan insentif dan dukungan finansial untuk

mendorong pihak perguruan tinggi dan industri lokal untuk berpartisipasi dan memenuhi persyaratan TKDN. Selain itu, aktor lainnya, seperti pihak kampus, industri lokal, dan masyarakat, dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan TKDN dengan cara memenuhi persyaratan TKDN, mengembangkan inovasi dan teknologi, serta membantu meningkatkan kualitas produk lokal.

Dalam hal evaluasi kebijakan TKDN, teori kebijakan publik James Anderson dapat membantu mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan kebijakan, serta mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi hasil implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dapat membantu meningkatkan efektivitas kebijakan TKDN di lingkungan perguruan tinggi, serta membantu meningkatkan keterlibatan aktor dan faktor terkait dalam implementasi kebijakan publik secara keseluruhan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di lingkungan perguruan tinggi memiliki beberapa manfaat dan tantangan yang perlu dipertimbangkan.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan kebijakan TKDN di lingkungan perguruan tinggi antara lain meningkatkan pengembangan produk lokal, meningkatkan daya saing industri lokal, dan mendorong inovasi dan teknologi. Selain itu, penerapan kebijakan TKDN dapat membantu pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah melalui pengembangan industri lokal.

Namun, penerapan kebijakan TKDN juga memiliki beberapa tantangan, seperti kurangnya ketersediaan sumber daya lokal yang memadai, kurangnya akses terhadap teknologi mutakhir, dan

keterbatasan anggaran yang tersedia. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu mempersiapkan diri dengan membangun kerjasama dengan industri lokal, melaksanakan riset dan pengembangan untuk menghasilkan produk dan teknologi yang lebih baik, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Dalam hal ini, perguruan tinggi dapat memanfaatkan teori kebijakan publik untuk membantu merancang kebijakan dan strategi yang tepat untuk penerapan TKDN di lingkungan kampus. Pemerintah juga dapat memberikan dukungan dan insentif yang diperlukan untuk mendorong perguruan tinggi dan industri lokal dalam memenuhi persyaratan TKDN.

Dengan persiapan dan implementasi yang baik, penerapan kebijakan TKDN di lingkungan perguruan tinggi dapat memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan bagi perkembangan industri lokal dan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdoellah, Awan Y, Yudi Rusfiana. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.

Danial, Mohammad, Dadang Mashur. 2014. *Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa*. FISIP Universita Riau. Pekanbaru.

Devanty, Airin., Muhammad Zilal Hamzah, Eleonora Sofilda. 2018. *Analisis Dampak Regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Terhadap Industri Pada Sektor Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Indonesia*. Universitas Trisakti. Jakarta.

Dewa Kadek Darmada, D. (2022). Mengupas Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Imperatif Pengadaan IT Kanwil Kemenhukam NTB). *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*, 97-107.

Gusli, Seventinus. 2020. *Analisis Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Untuk*

Proyek Konstruksi Gedung Di Yogyakarta. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.

Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*.

Mustari, Nuryanti. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Leutika Prio. Yogyakarta.

Ndikron, Suryaningsih, M., & Slamet, R. S. (2020). *Implementasi E-Procurement Di Universitas Diponegoro*. 1-11.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Prasetyo, Taufan. 2016. *Analisis Potensi Peningkatan TKDN Untuk Mendukung Daya Saing Industri Galangan Kapal Dalam Negeri*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya.

Satiaksa, M Irfan. 2018. *Analisis Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pada Pekerjaan Konstruksi Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Siallagan, Ri., Bagus, I. M. A. D., & Musmuliadi. (2022). *Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat*. 1(1), 112-124.